

BAB III

Perjuangan Organisasi Masyarakat Sipil Islam dalam Dinamika Politik di Banten

Endang Turmudi

Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Islam taat, Banten adalah salah satu provinsi penting di Jawa Barat di mana politik Islam begitu kuat diperjuangkan oleh masyarakat Islam. Kecenderungan seperti ini memang masuk akal mengingat di daerah Banten masyarakatnya mengalami *exposure* kuat dan lama terhadap gelora perjuangan Islam. Dimulai dengan persentuhan dengan penjajah Belanda di saat Banten mempunyai kerajaan Islam, persentuhan masyarakat dengan politik Islam diperkuat dengan hadirnya Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai politik. NU adalah organisasi sosial keagamaan yang dipakai oleh para ulama Banten untuk mengembangkan dan mempertahankan *Sunnisme* dalam masyarakat Banten modern. Keterlibatan NU dalam politik dan bahkan menjadi partai politik telah membawa masyarakat Banten yang secara ideologis condong kepada NU untuk ikut mem-

E. Turmudi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: endangturmudi@yahoo.com

© 2024 Editor & Penulis

Turmudi, E. (2024). Perjuangan organisasi masyarakat sipil Islam dalam dinamika politik di Banten.

Dalam E. Turmudi (Ed.), *Masyarakat Sipil Islam dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia* (81–110).

Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.753.c930

E-ISBN: 978-623-8372-64-5

perjuangkan politik Islam. Di tahun 1950-an, politik Islam yang diperjuangkan oleh NU dan Masyumi, termasuk oleh partai-partai Islam lain, sebenarnya tidak terbatas pada mewarnai negara dengan Islam, melainkan lebih dari itu terdapat juga keinginan mendirikan Negara Islam (Fealy, 2003). Hal ini berarti, para ulama Banten dulu juga mempunyai keinginan seperti itu.

Perjuangan politik Islam di Banten sama saja dengan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di berbagai daerah yang kesemuanya bisa dilihat melalui kiprah dua partai politik Islam, yakni Masyumi dan NU. Hanya saja kelebihan Banten adalah bahwa kecondongan mereka terhadap politik Islam lebih kuat daripada di daerah lain di Jawa. Mengingat pendiri Orde Baru cukup peduli dengan perkembangan dan perjuangan politik Islam oleh para pendukungnya dan dengan kekhawatiran menguatnya pendukung politik Islam setelah mereka berhasil melawan penganut komunisme, hal yang pertama ditata oleh Suharto adalah menata partai-partai Islam agar tidak membesar dan mendapat dukungan masyarakat. Orde Baru berhasil melemahkan atau bahkan meminggirkan partai politik Islam, yang berarti juga menghilangkan politik Islam agar tidak dipakai oleh umat Islam, melalui kebijakan 'asas tunggal' nya. Patut dicatat bahwa sejak awal berdirinya, Orde Baru, dengan kekhawatirannya akan politik Islam, merancang pelemahan partai-partai Islam. Menjelang pemilu 1971, misalnya, penguasa sudah menilai masyarakat Banten sebagai pemeluk Islam taat dan kuat dan pendukung politik Islam. Oleh karena khawatir dengan politik Islam tersebut, Banten sebagai penganut Islam taat dan kuat memang bisa jadi ancaman bagi pemerintah sekuler ini. Oleh karena itu, sudah sejak awal para tokoh dan ulama Banten didekati oleh penguasa Orde Baru. Seperti strategi yang biasa dipakai oleh penguasa, para tokoh yang kebanyakan ulama ini diajak untuk ikut dalam gerbong partai pemerintah. Suharto sejak menjelang pemilu 1971 sudah mengajak para ulama untuk menjadi pendukung pemerintah dengan mengumpulkan mereka dalam apa yang disebut Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama).

Bisa dikatakan bahwa seluruh umat Islam memperjuangkan politik Islam dengan memberikan dukungan terhadap partai politik Islam. Di masa Orde Lama dua partai Islam, yakni Masyumi dan NU, menjadi partai yang didukung oleh umat Islam Banten; dan di masa Orde Baru berkuasa, dukungan masyarakat Banten diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai satu-satunya partai Islam. Kuatnya berislam masyarakat ini bisa dilihat dari dukungan yang tetap diberikan masyarakat Banten terhadap PPP sebagai partai Islam. Lepas dari munculnya orang-orang dan ulama yang memberikan dukungan terhadap partai pemerintah—yaitu Golkar—kebanyakan masyarakat Banten tidak bergeser untuk tetap mendukung partai Islam.

Dukungan terhadap Islam ini adalah berkat keberhasilan organisasi Islam atau lebih tepatnya organisasi masyarakat sipil Islam, seperti Muhammadiyah dan NU dalam membina umat dan membangun Islam pada umumnya. Mereka inilah yang sejak berdirinya di awal abad 20 membina umat dan mengembangkannya, serta mengembangkan Islam itu sendiri sebagai agama yang secara politik berlawanan dengan pemerintah kolonial karena kedua organisasi ini menentang kolonialisme. Pada masa kemerdekaan, dua organisasi ini adalah pendukung politik Islam dengan menjadi penopang utama partai Islam Masyumi dan partai NU, yang bersama partai Islam lainnya berjuang untuk kepentingan umat Islam. Di wilayah Banten dengan jumlah penduduknya yang 95% muslim, memang bukan hanya dua organisasi tadi yang diikuti oleh masyarakat. Akan tetapi, nyata bahwa keduanya dipeluk atau diikuti oleh mayoritas masyarakat Banten pada umumnya.

Dalam perkembangannya, perubahan telah terjadi pada orientasi politik masyarakat Banten, yang pada akhirnya memberikan dukungan terhadap partai sekuler, termasuk partai politik baru yang didirikan setelah reformasi digulirkan. Seperti terlihat dalam bahasan dalam bab ini, partai-partai sekuler ini justru didukung oleh lebih besar penduduk Banten daripada partai-partai Islam. Pergeseran ini tentu saja karena terjadinya perubahan pada masyarakat Banten pada

umumnya. Setelah daerah ini menjadi provinsi, akses masyarakat terhadap informasi dan juga pendidikan lebih terbuka lebar daripada sebelumnya. Selain itu, apa yang juga penting adalah perubahan situasi politik sendiri, di mana demokratisasi yang dibawa oleh reformasi telah membawa rakyat Banten mendirikan berbagai partai politik baru, termasuk yang berkarakter sekuler.

A. Banten yang Islami

Sudah sejak lama masyarakat Banten adalah pendukung politik Islam. Dukungan dan orientasi politik ini memang sesuatu yang wajar bila melihat kenyataan bahwa masyarakat Banten sangat Islami, atau merupakan pemeluk taat Islam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah warisan dari proses Islamisasi yang sangat kuat dan menghasilkan lahirnya kerajaan Islam Banten. Dengan kondisi seperti itu, di Banten lahir para ulama dan aulia yang kemudian memperkuat keberislaman masyarakat Banten. Warisan inilah yang kemudian membentuk masyarakat Banten sangat religius sampai hari ini. Hal itu pula yang menyebabkan bukan saja berkembangnya pendidikan Islam yang direncanakan dan dilakukan para tokoh Islam dan ulama, tetapi juga menyebabkan lahirnya berbagai organisasi Islam modern. Organisasi Islam ini adalah sebagai sarana perjuangan dalam mengembangkan Islam dan membantu para muslim yang hidup di daerah Banten.

Untuk memahami kenapa Banten seperti ini, ada baiknya kita melihat secara sepintas sejarah sosial politik yang hidup di Banten sejauh ini. Banten adalah pusat kerjaan Islam yang didirikan oleh para ulama, seperti halnya kerajaan Islam Cirebon atau Demak karena ketiganya memang sengaja didirikan untuk membangun Islam di wilayah Jawa khususnya, dan Nusantara pada umumnya. Hadirnya kerajaan Islam di Demak, yang melanjutkan kerajaan Majapahit yang tumbang, merupakan langkah politik dakwah para ulama, yang kemudian diteruskan dengan berdirinya kerajaan Cirebon dan Banten. Oleh karena fakta sejarah seperti ini, para elite utama dalam politik Banten adalah para ulama. Kedudukan tinggi ulama ini karena sejarah Islam

telah mendudukkan sebagian ulama sebagai pejabat kerajaan. Para ulama ini, meskipun mayoritasnya tidak memegang jabatan formal, adalah elite yang secara kultural ikut menggerakkan masyarakat.

Para ulama adalah orang terpelajar yang dengan ilmunya bisa menghimpun masyarakat sebagai para muridnya. Selain itu, ulama juga menjadi pusat pembelajaran melalui pesantren yang didirikannya sehingga mereka juga bisa menjadi kelompok khusus Islam, dengan pengikut ratusan dan bahkan ribuan santri sebagai muridnya. Melalui pesantren inilah para ulama juga mendidik para muridnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengambil atau menjalankan politik Islam. Dengan masih kuatnya tradisi pesantren, maksudnya mempelajari Islam melalui pesantren, keberislaman atau religiositas masyarakat tetap terjaga karena dari pesantren itu lahir ulama-ulama baru yang berjuang untuk Islam. Dari jumlah ribuan pesantren yang terdapat di wilayah Banten ini (lihat Tabel 3.1), memang sudah banyak yang berubah, misalnya dari sisi sistem pendidikannya, di mana mata pelajaran umum sekuler juga diajarkan sehingga sedikit banyak membawa perubahan secara umum pada masyarakat Banten. Akan tetapi, dengan banyaknya pesantren ini, masyarakat Banten yang kuat dalam mempraktikkan Islam tetap terjaga sebagai masyarakat religius. Itulah hasil dari pengabdian para ulama.

Tabel 3.1 Statistik Data Pondok Pesantren

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pesantren
1.	Pandeglang	1.168
2.	Lebak	1.593
3.	Tangerang	439
4.	Serang	1.023
5.	Kota Tangerang	114
6.	Kota Cilegon	45
7.	Kota Serang	121
8.	Kota Tangerang Selatan	76

Selain para ulama, apa yang penting sebagai elite dalam masyarakat Banten adalah para jawara. Di Banten, para jawara ini sudah sejak lama menduduki posisi terhormat karena keilmuannya telah menyebabkan mereka bukan saja mempunyai pengikut, tetapi juga memengaruhi masyarakat luas. Para jawara adalah para jago yang biasanya mempunyai keterampilan silat dan ilmu *kanuragan*. Perlawanan terhadap kekuasaan, misalnya, biasa dilakukan oleh para ulama dan jawara ini. Keduanya mempunyai pengetahuan, meski berbeda, yang bisa menghimpun kekuatan masyarakat, yang dengan karismanya dapat membuat masyarakat mengikuti segala perintahnya. Jawara berarti jago, yang dengan keilmuwan baik mistik atau lainnya bisa mengalahkan lawannya dalam pertandingan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ulama juga bisa merangkap sebagai jawara yang memang mempunyai ilmu *kanuragan*. Meskipun demikian, karena bidang yang digelutinya memang berbeda maka sebutan jawara ini lebih khusus merujuk pada kelompok orang dengan identitas atau karakter tertentu. Ulama lebih bergerak dalam pendidikan keislaman, seperti pesantren atau juga dakwah, dengan menyebarkan Islam atau menyampaikan perintah Islam melalui ceramah umum. Sementara itu, jawara lebih bergerak dalam penguasaan ilmu *kanuragan* sehingga mereka menjadi jago dalam bertarung dengan pihak atau kelompok lain.

Peran Ulama dan jawara ini sangat jelas dan tercatat dalam sejarah masyarakat Banten. Gerakan perlawanan yang disebut sebagai Pemberontakan Petani Banten, seperti diungkap oleh Sartono Kartodirdjo (1984) dipimpin oleh para ulama dengan dukungan jawara. Hal ini lagi-lagi karena terutama ulama adalah pemimpin masyarakat Banten yang, meskipun informal, dengan kharismanya bisa menggerakkan masyarakat untuk mengikuti perintahnya. Pemberontakan Banten adalah protes atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat petani Banten. Ketidakadilan memang hal biasa di masa kolonial, tetapi memunculkan pemberontakan karena ketidakadilan telah dipertontonkan oleh pemerintah kolonial secara luar biasa. Ketidakadilan ini bisa dilihat dari gambaran seorang Belanda bernama

Douwes Dekker dalam romannya berjudul *Max Havelaar*. Dengan berlandas pada ajaran atau etika Islam, para ulama dan juga jawara memprotes tindakan-tindakan Belanda yang menindas dan zalim.

Di wilayah Banten sekarang ini bisa dilihat adanya ratusan kuburan para ulama yang bahkan biasa disebut wali yang didatangi kalangan Islam taat. Bukti ini memperlihatkan begitu kuatnya masyarakat Banten dalam memeluk dan menjalankan Islam. Di luar para ulama yang memegang jabatan formal kerajaan, terdapat juga ulama cendekiawan yang menuliskan ajaran Islam untuk dibaca umat Islam. Ulama ini bernama Kiai Nawawi Al-Bantani. Ulama yang pernah bermukim di Mekah dengan mengajar di Masjidil Haram ini adalah kelahiran Banten, yang kitab atau buku yang ditulisnya diajarkan di ribuan pesantren di Indonesia, bahkan juga di madrasah-madrasah di Negara Arab.

Ulama dan Jawara kini menjadi elite politik dalam masyarakat Banten pada umumnya. Meskipun berasal dari bidang atau wadah perkembangan yang berbeda, mereka telah mampu melakukan mobilitas sosial dan masuk dalam panggung perpolitikan Banten. Di masa awal setelah Indonesia merdeka, banyak para ulama yang terekruit menjadi pejabat, mulai dari bupati hingga camat. Meskipun peran dan posisi politik ini kemudian menurun, sampai awal berdirinya Orde Baru para ulama tetap dilihat dan diperhitungkan oleh pemerintah. Orde Baru berusaha merekrut para ulama ke dalam tubuh Golkar sebagai mesin politiknya dengan membentuk apa yang disebut sebagai Satkar Ulama. Pada sisi lain, Orde Baru juga merekrut para jawara untuk kepemimpinan lokal Golkar dengan maksud mengajak masyarakat Banten untuk mendukung Golkar.

Oleh sebab itu, agak berbeda dengan kelompok lain yang sudah terkooptasi, para ulama di Banten tetap berjuang secara politik melalui PPP, dengan segala resikonya. Banyak ulama yang menjadi target ancaman politik karena mereka tidak mau menjadi bagian dari Golkar. Mereka yang menantang atau melawan biasanya ditangkap oleh penguasa Orde Baru. Buya Dimiyathi yang dianggap melawan pemerintah pernah ditangkap pada pemilu 1977. Buya ini adalah

pendukung PPP sebagai partai Islam saat itu. Sama dengan di wilayah lain, para ulama memang menjadi pendukung PPP saat itu karena NU pada pemilu 1977 masih merupakan pendukung utama partai Islam ini. Seorang tokohnya, Kiai Bisri Syansuri pernah menyatakan tentang wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mendukung PPP. Dengan fatwa ini masyarakat dan para ulama di Banten tetap kuat mendukung PPP sebagai partai Islam.

Seperti terjadi dengan daerah lainnya, politik Islam para ulama ini juga berubah atau meluntur sejalan dengan diberlakukannya 'Asas Tunggal' oleh Orde Baru, di mana NU bukan hanya keluar dari PPP karena terjadinya pengusuran oleh pemerintah dengan memakai tangan John Naro, tetapi juga NU sendiri terpaksa menerima kebijakan tersebut. Berhasilnya Orde Baru meminggirkan partai Islam dan melarang organisasi apapun untuk memakai Islam sebagai ideologi dasarnya telah menyebabkan partai-partai sekuler yang didirikan paska reformasi melejit dan mendapat dukungan besar. Keberhasilan ini tentu juga ditopang oleh kondisi masyarakat Banten sendiri yang meskipun adalah penganut Islam, tetapi terdapat juga di antara mereka yang Islamnya tidak kuat. Seperti diketahui di Banten dahulu kala, terdapat para pengikut partai komunis atau PKI yang awalnya dibawa oleh seorang pegawai jawatan kereta api, yang dipensiunkan dari Jakarta. Oleh sebab itu, lepas dari kuatnya masyarakat Banten dalam menganut Islam, di sana juga terdapat masyarakat Abangan yang menitikkan kepentingan politiknya kepada PKI.

Kuatnya Islam tertanam di Banten bisa dilihat dari banyaknya pusat-pusat pendidikan Islam. Masyarakat Banten terbiasa mendidik anak mereka dengan mengirimkannya ke pesantren. Pendidikan dengan sistem ini telah lama didirikan oleh para ulama, setua Islam itu sendiri di Banten. Tidak mengherankan bahwa masyarakat Banten menjadi penganut Islam yang cukup kuat. Untuk seluruh Banten, saat ini terdapat sekitar 4.000-an pesantren, yang dengan modernisasi yang dilaluinya menyediakan bukan hanya pendidikan Islam, tetapi juga pendidikan dengan materi ajar sekuler. Selain pesantren, di Banten juga terdapat hampir 4.000 sekolah Islam sampai tingkat menengah

Tabel 3.2 Jumlah Madrasah di Provinsi Banten (RA, MI, MTS, MA)

No.	Kabupaten/Kota	Negeri	Swasta	Total
1.	Kota Cilegon	6	137	143
2	Kota Serang	4	185	189
3	Kota Tangerang	6	552	558
4	Kota Tangerang Selatan	5	245	250
5	Kab. Lebak	8	704	712
6	Kab. Pandeglang	13	665	678
7	Kab. Serang	10	583	593
8	Kab. Tangerang	17	828	845
	Total	69	3.899	3.968

Sumber: Kementerian Agama (t.t.)

atas, seperti terlihat pada Tabel 3.2. Apa yang juga penting adalah kenyataan bahwa perguruan tinggi Islam juga dikembangkan oleh masyarakat Banten. Fakta-fakta ini sekali lagi menjadi faktor cukup penting dalam membawa masyarakat Banten menjadi sangat Islami atau penganut Islam taat.

B. Organisasi Masyarakat Sipil Islam

Dua kelompok masyarakat sipil yang mempunyai jumlah anggota besar adalah Muhammadiyah dan NU. Di wilayah Banten, dua organisasi inilah yang hidup dan aktif mengembangkan dirinya dan juga melebarkan darma baktinya kepada masyarakat luas, terutama melalui pendidikan dan pengembangan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, kedua organisasi ini mengembangkan dua model pendidikan yang sedikit berbeda. Muhammadiyah, dengan berpegang pada prinsip amal ibadah, mendirikan banyak sekolah yang berbau agama. Sekolah ini, seperti sekolah umum dengan pemberian mata pelajaran agama yang cukup besar jumlahnya. Jenis sekolah ini disebut madrasah, yang dari sisi arti sebetulnya sama saja dengan sekolah. Akan tetapi, sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Arab, sebutan madrasah

mungkin untuk memberi kesan bahwa pendidikan agama bukan saja masih diajarkan, melainkan juga masih besar jumlahnya.

NU, pada sisi lain, lebih condong pada mengembangkan pendidikan pesantren, yakni pendidikan Islam yang pada awalnya lebih fokus pada pemberian materi pelajaran keislaman. Pendidikan pesantren ini pada awalnya bergaya tradisional yang tidak memakai sistem kelas sehingga suatu kelas dengan materi pelajaran X bisa saja diikuti oleh murid dari beragam umur. Meskipun demikian, perubahan sudah banyak terjadi, dan pesantren sendiri mengakomodir sistem pendidikan modern. Pesantren di Banten sekarang mempunyai atau mengoordinasikan banyak sekolah. Oleh karena itu, di pesantren yang biasanya dikelola oleh yayasan terdapat beberapa madrasah atau bahkan sekolah umum sehingga pelajar di pesantren itu dapat juga melakukan studi keilmuan umum atau sekuler dan nonagama.

Kegiatan keagamaan seperti itu sudah dilakukan oleh umat Islam atau para pengikut NU dan Muhammadiyah, bahkan sejak jaman kolonial, yakni sejak organisasi ini didirikan. Selain itu, di wilayah Banten terdapat organisasi Islam lainnya, yakni Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Ketiga organisasi ini dikenal militan, bahkan FPI belakangan disebut sebagai organisasi radikal, meskipun dalam pengakuan para tokohnya FPI merupakan penganut ahli *sunmah wal jamaah*. Sementara itu, HTI adalah bagian dari organisasi internasional, bernama Hizbut-Tahrir. Lebih dari itu, HTI memang memimpin atau berkeinginan bukan hanya dilaksanakannya syariat Islam dalam kehidupan keseharian umat Islam secara konsisten, tetapi juga mereka berharap dapat mendirikan kekhalifahan Islam. Selain HTI, MMI juga mempunyai pikiran dan harapan yang sama terkait dengan yang mereka perjuangkan, yaitu mendirikan khilafah Islamiah.

1. Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) didirikan di masa reformasi, tepatnya pada 17 Agustus 1998 oleh para ulama dan habaib (keturunan Nabi Muhammad). Riziq Shihab diamanati untuk memimpin organisasi

ini. Sesuai dengan namanya, FPI mendudukkan diri sebagai penjaga Islam dan umatnya. Tujuan didirikannya FPI adalah untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Konsep yang biasa dikenal umum umat Islam ini intinya adalah menguatkan ibadah, atau lebih jauh lagi, menerapkan etika Islam. Amar makruf nahi munkar itu berada dalam bingkai ibadah yang menjadi inti kehidupan umat Islam di dunia. Dalam melaksanakan ide-ide terkait dengan ibadah ini, FPI berpedoman untuk mendapatkan rida Allah melalui jihad. Sebagai organisasi Islam, FPI menggunakan Islam sebagai asas pergerakannya, memakai Pancasila sebagai bingkai perjuangan politiknya, dan mengikuti UUD 1945 sebagai panduan perjuangan mereka. Sebagai organisasi keagamaan, FPI tidak berafiliasi dengan partai politik apapun, tentunya termasuk tidak berafiliasi dengan partai politik Islam. Meskipun demikian, seperti diakui oleh Ahmad Sobri Lubis, salah seorang ketuanya, FPI juga menyatakan ingin membangun khilafah Islamiyah walau tidak dalam bentuk kesultanan dan tidak mengganti NKRI (Nurita, 2019).

Selama bertahun-tahun FPI melaksanakan amar makruf nahi munkar itu dengan gerakan melarang kemaksiatan. Kemaksiatan adalah perilaku atau tindakan yang dilarang oleh Islam, dan FPI sebagai penganut Islam kuat melaksanakan amar makruf nahi munkar ini dengan tindakan riil, seperti razia ke tempat-tempat hiburan. Razia ini dilakukan oleh FPI di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa yang berpenduduk padat dan memiliki tempat-tempat hiburan yang bertebaran dalam jumlah ribuan. Dalam banyak kasus, razia oleh anggota FPI ini seperti tidak diketahui oleh polisi. Artinya, anggota FPI dengan leluasa, misalnya, melakukan pengambilan minuman keras di tempat-tempat hiburan tersebut dan membuangnya agar musnah. Hal ini adalah tindakan-tindakan polisional dengan mengatasnamakan amar makruf nahi munkar yang menyebabkan FPI bukan saja disebut keras atau intoleran, tetapi juga belakangan disebut sebagai radikal. Intoleran adalah kata umum yang disematkan kepada FPI yang dinilai tidak menghargai perbedaan. Akan tetapi, dalam kamus FPI tidak ada toleransi untuk melakukan kemaksiatan karena dengan membiarkan

dapat berarti setuju atau bahkan mendukung. Oleh karena itu, dalam menjalankan amar makruf dan nahi munkar tersebut, razia dilakukan.

Sama dengan di kota lain, FPI di daerah Banten juga melakukan gerakan pemberantasan apa yang mereka sebut sebagai maksiat. Tindakan-tindakan maksiat memang sudah dilakukan oleh sebagian orang dengan hadirnya tempat hiburan yang didirikan oleh para pebisnis. Bisnis maksiat yang dimaksud tidak pernah diperhatikan oleh aparat kepolisian, FPI kemudian mengambil alih fungsi kontrol dalam mencegah berkembangnya maksiat tersebut. Dalam perkembangan saat ini, fungsi itu telah dilakukan oleh polisi pamong praja. Oleh karena itu, sering terjadi polisi pamong praja atau yang biasa disebut satpol PP melakukan razia terhadap diskotek atau bahkan menggedor pintu-pintu kamar hotel yang diduga dipakai oleh orang-orang yang melakukan zina. Dulu, sebelum kegiatan ini dilakukan oleh satpol PP, FPI biasa melakukan razia baik terhadap tempat-tempat maksiat atau juga warung-warung yang buka selama bulan Ramadan. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2014, sejumlah anggota FPI masuk ke suatu tempat hiburan malam di Serang. Mereka berhasil mendapatkan ratusan botol miras lalu menghancurkannya. Hal ini dilakukan menjelang Iduladha. Mendekati hari suci umat Islam, mereka membersihkan hal-hal yang berbau maksiat (Liputan6, 2014). FPI Banten juga pernah merazia para waria yang mangkal di daerah Cikande (KabarBanten, 2017) dan menasehati yang tertangkap agar tidak mengulangi perbuatan yang mengundang dosa ini.

Alasan yang biasa diberikan oleh mereka dalam tindakan razia ini adalah bahwa ini adalah bagian dari amar makruf nahi munkar. Dalam hal ini, FPI merasa melakukan perintah Islam terkait pelarangan perbuatan mungkar atau maksiat. Menurut mereka, apa yang dilakukan ini adalah kewajiban, seperti dinyatakan dalam hadis, yaitu “barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus mengubahnya dengan tangannya (kekuatannya), jika tidak bisa maka dia melakukan penolakan ini dengan lidahnya, dan jika masih tidak bisa melakukannya maka penolakan akan kemungkaran itu bisa dilakukan dengan hatinya. Tindakan yang terakhir ini adalah

menandakan lemahnya iman”. Oleh karena itu, dalam menolak atau memberantas kemungkaran ini, FPI melakukannya dengan tindakan langsung karena mereka memang bisa melakukannya. Dalam melakukan razia, misalnya, FPI biasanya sendirian dan polisi memang tidak mengetahui tindakan FPI ini.

Selain itu, FPI sebenarnya juga melakukan kegiatan yang masuk dalam kategori bakti sosial. Jadi, di samping amar makruf nahi mungkar yang menonjol tadi, FPI juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketika dulu tsunami Aceh terjadi, anggota FPI ikut turun membantu para korban, mengumpulkan mayat, dan lain sebagainya. Di Banten, mereka juga melakukan hal yang serupa, membantu para korban banjir di Lebak, misalnya, dengan memberikan tempat perlindungan bagi para korban. Ketua atau imam FPI lokal, yaitu Kiai Qurthubi yang juga pimpinan pesantren Salafi Al-Futuhiyah, bahkan konon membeli sawah lalu membangun rumah untuk para korban banjir tersebut. Memang nyata bahwa mereka melakukan amal sosial seperti itu dan baru-baru ini, setelah FPI berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, mereka juga membagikan daging kurban yang mereka potong sendiri. Artinya, kurban ini berasal dari amal ibadah perorangan orang-orang FPI itu sendiri. Hal ini semua adalah gambaran umum yang terjadi di Banten, dan juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, di samping melakukan nahi mungkar yang paling kentara dan dilakukan dengan cukup keras, seperti menutup tempat maksiat, FPI juga melakukan amal sosial yang memang juga menjadi bagian dari ladang kerja ibadah mereka. Amal sosial ini adalah sebagai salah satu dari orientasi kerja FPI, yaitu membangun dan memberikan perhatian terhadap masalah kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Dari sekian organisasi kecil yang tumbuh di wilayah Banten, FPI adalah yang paling aktif dan mempunyai kegiatan yang jelas. Meskipun sama-sama fanatik dalam berislam, HTI terlihat lebih eksklusif. Prinsip-prinsip yang dipegangnya terkait dengan kehidupan politik, memang tidak pas atau tidak cocok dalam negara yang bisa disebut sekuler. Demokrasi juga dikritik tajam oleh para aktivis HTI

karena dianggap bukan sistem yang berpangkal pada kekuasaan Allah, melainkan pada kekuasaan manusia. Artinya, dasar demokrasi adalah kekuatan rakyat, sementara Islam menekankan tentang mutlaknya kekuasaan Allah. Lebih dari itu, perbedaan pemahaman terhadap demokrasi ini dianggap menyalahi perintah Islam dan mereka yang mengingkarinya dalam beberapa hal bisa dianggap keluar dari Islam.

Dari banyak organisasi yang mewakili atau yang merasa mewakili umat Islam, memang hanya organisasi Islam yang sudah disebut tadi yang didiskusikan di sini. Selebihnya adalah organisasi kecil dan pesantren. Pesantren di sini sering tampil sendiri sebagai lembaga yang mewakili umat Islam tertentu. Mereka dalam hal ini tidak menyatakan afiliasinya kepada organisasi-organisasi Islam yang lain. Mereka juga seolah tidak berafiliasi dengan NU yang mengelola ribuan pesantren di Banten. Hal ini memperlihatkan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berdiri di atas kaki sendiri dengan mengeklaim dirinya sebagai lembaga yang merdeka, dalam artian tidak berafiliasi dengan organisasi Islam manapun. Meskipun demikian, gerakan politik yang diperlihatkannya atau diambilnya tidaklah sebesar atau sesering kelompok organisasi masyarakat sipil Islam tadi.

Apa yang penting dicatat adalah bahwa FPI, tidak seperti HTI, ikut berpartisipasi dalam politik Indonesia, setidaknya dengan ikut serta dalam pemilu, dan memberikan kritik atau kontrol terhadap pengaturan pemerintahan. Oleh karena itu, hampir sama dengan NU, mereka adalah pengikut *Ahli Sunnah wal Jamaah*. Dari sisi pemahaman dan praktik berislamnya, mereka mengikuti salah satu dari empat mazhab yang ada. FPI adalah organisasi masyarakat sipil Islam yang lebih condong bermazhab Syafii. Oleh sebab itu, FPI di Banten didukung oleh para ulama pesantren karena dari sisi ideologinya mereka mempunyai kesamaan, yaitu *Ahli Sunnah wal Jamaah*. Bedanya dengan NU adalah bahwa mereka lebih keras dalam melaksanakan ajaran Islam mereka.

2. Majelis Mujahidin Indonesia

Selain FPI dan HTI, organisasi Islam baru yang juga hadir di Banten adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). MMI didirikan di Yogyakarta dalam pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Organisasi ini bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam. MMI di Banten, dan sama dengan di tempat lain, adalah organisasi fundamentalis, yang sangat kuat dalam memegang dan menerapkan ajaran Islam. Sama dengan kalangan Islam lain, politik Islam juga masih diperjuangkan kuat oleh MMI di wilayah Banten. Seorang tokoh MMI bernama Abu Jibril secara tegas meminta umat Islam untuk memilih orang Islam sebagai pemimpin mereka. Meskipun terasa fanatik, permintaan dan dorongan seperti ini sebetulnya lebih memperlihatkan sikap yang biasa, alias tidak ekstrem. Akan tetapi, seperti diketahui, MMI adalah organisasi masyarakat sipil Islam yang bertujuan atau berkeinginan mendirikan khilafah, seperti halnya HTI. Oleh karena itu, tuntutan untuk memilih orang Islam dalam pilkada atau pemilu masih selaras dengan karakter organisasi ini. Meskipun demikian, sikap ini masih terbelang moderat dalam artian tidak ekstrem. MMI juga terlihat lebih terbuka dan mau berpartisipasi dalam demokrasi dengan cara terlibat baik dalam pemilu maupun pilkada sebagai pemberi suara atau pemilih. Apa yang dikemukakan oleh Abu Jibril adalah sikap umum saja yang moderat, seperti permintaan untuk tidak golput dan termasuk untuk menghindari isu SARA yang bahkan bisa memecah umat Islam (Cakrawalanews, 2018).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa MMI, hampir sama dengan FPI, sangat fanatik dalam berislam. MMI marah bila terdapat pihak-pihak yang mendiskreditkan Islam. Pernah terjadi, Abu Jibril marah karena terdapat ulama atau bahkan habib yang menyebut radikalisme dilakukan oleh kalangan Islam. Meskipun tidak menunjuk pada MMI, para tokohnya marah dengan sebutan atau pelabelan umat Islam dengan terorisme tersebut. Tokoh MMI, Irfan S. Awwas misalnya, marah dengan sebutan oleh ulama atau tokoh Islam lain yang menuding Abu Jibril menyebarkan ajaran sesat. Dalam kasus ini, Irfan membalas dengan menyebut orang yang menuduh tadi sebagai

habib palsu. Lebih jauh, Irfan mengajak penuduh tadi untuk berdebat terkait ajaran yang disebut sesat tadi (Detiknews, 2009). Meskipun demikian, MMI hanya agak kuat bersuara, tetapi tidak segarang FPI dalam melakukan tindakan, termasuk ketika merespons tuduhan tersebut. Hal ini terjadi karena MMI memang organisasi kecil jika dilihat dari sisi jumlah pengikut. Apa yang membedakannya dari FPI adalah bahwa MMI lebih fokus pada dakwah umum dan tidak melakukan gerakan ekstrem seperti razia sehingga tidak ada pihak-pihak yang memaki-maki MMI karena masalah-masalah sosial yang terjadi.

C. Ulama dalam Politik Banten

Hadirnya kerajaan Islam di Banten akhirnya menempatkan bukan saja Islam sebagai landasan hidup masyarakatnya, tetapi juga pada sisi lain menempatkan para ulama sebagai pemimpin dan elite politik yang dihargai. Oleh sebab itu, di masa Indonesia merdeka, politik Islam menjadi pegangan dan medium perjuangan dan sekaligus menjadi sasaran arah politik mereka. Dapat dipastikan bahwa orientasi ini sama dengan yang terjadi di tingkat nasional. Perjuangan politik Masyumi dan NU adalah juga perjuangan politik masyarakat Banten yang menggunakan kedua partai politik ini sebagai kendaraan perjuangan mereka. Sama dengan yang terjadi pada tingkat nasional, politik masyarakat Islam di Banten mengalami tekanan semasa Orde Baru berkuasa. Afiliasi masyarakat Banten cukup kuat terhadap PPP sebagai satu-satunya partai Islam, tidak mengherankan bahwa banyak ulama yang mendapatkan intimidasi pemerintah atau oknum pemerintah Orde Baru. Seperti dapat diduga, masyarakat Banten juga mengalami penurunan dalam hal pegangan dan dukungan partai Islam ini karena tekanan politik Orde Baru begitu terasa dan melemahkan semangat mereka.

Bisa dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Banten adalah penganut *Ahli Sunnah Wal Jamaah* yang direpresentasikan oleh NU. Kemenangan NU membantu Suharto dalam menumpas komunis telah menempatkan NU sebagai pihak yang secara jelas mendukung dan menjaga Negara Indonesia. Namun, pada sisi lain, pemerintah

Orde Baru di bawah pimpinan Suharto juga ragu atau bahkan khawatir dengan NU yang memperlihatkan Islam kuat dengan menganut politik Islam. Kekhawatiran ini didasarkan pada kiprah partai NU selama masa Orde Lama, yang bersama Masyumi ikut berjuang untuk politik Islam (Fealy, 2003). Suharto, yang kemudian terbukti 'anti-Islam' bukan saja menekan Partai NU pada pemilu 1971, tetapi juga membuat strategi pelemahan politik Islam dengan mendekati para kiai berpengaruh di daerah-daerah. Di antara yang cukup penting menjadi perhatian Suharto adalah Banten yang kental dengan Islam. Menjelang pemilu 1971, setelah Suharto berkuasa, para petinggi negara ikut memikirkan masalah Banten ini. Hal ini dikarenakan Banten adalah penyangga Jakarta. Saat itu, di sebelah timur dan Selatan Jakarta seperti tidak bermasalah dalam hal berpolitik Islamnya, tetapi Banten mempunyai pengalaman politik Islam yang kuat, setidaknya karena di sana pernah berdiri kerajaan Islam, yang telah membuat masyarakat Banten sangat taat Islam. Oleh karena itu, Banten menjadi perhatian khusus yang membuat bahkan Suharto sendiri turun tangan.

Dimulai dari pejabat di Banten sendiri yang menyadari pentingnya ulama, mereka mencoba mengomunikasikan masalah ini dengan pejabat yang lebih tinggi, yaitu gubernur Jawa Barat. Sang Gubernur, yakni Sholihin GP, bersama pangdam Siliwangi, Witono, menyambut gagasan tersebut dan mereka dipertemukan dengan tokoh Banten bernama K.H. Mahmud (Hamid, 2011). Pertemuan dilanjutkan dengan berkunjungnya Pangkowilhan II, yaitu Letjen Surono menemui ulama ini. Tujuan dan keinginan para pejabat tersebut adalah agar para kiai di Banten masuk menjadi pendukung Golkar. Begitu pentingnya Banten, Suharto sendiri akhirnya menemui kiai kharismatik ini. Pertemuan yang berlangsung di Batukuwung akhirnya membuat K.H. Mahmud dan beberapa kiai menyatakan diri ikut Golkar. Kiai Mahmud ini akhirnya didaulat untuk mendirikan organisasi, dengan tujuan membantu Golkar, bernama Satkar Ulama. Organisasi ini intinya akan memobilisasi para ulama untuk mendukung Golkar pada pemilu 1971. Pemilu 1971 ini adalah taruhan Suharto dalam melegitimasi kekuasaannya, yang sudah ia raih dengan diangkatnya

sebagai presiden oleh MPR pada 1968. Meskipun sudah diangkat menjadi presiden, Suharto memerlukan legitimasi dari rakyat dengan cara pemilu, di mana partai Golkar yang akan memilihnya di MPR harus menang dalam pemilu ini. Kemenangan Golkar dalam pemilu ini dianggap sebagai dukungan rakyat yang sekaligus melegitimasi Suharto atas diangkatnya sebagai presiden oleh MPR.

Hadirnya Satkar Ulama ini menandai dua hal. *Pertama* adalah terbaginya umat Islam Banten secara politik, yakni sebagian orang-orang NU yang merupakan masyarakat santri Banten ternyata dengan mudah berbelok dan mendukung partai lain, yaitu Golkar. Hal ini sekaligus memperlihatkan tidak kuatnya komunikasi NU pusat dengan daerah karena pembelokan seperti itu tidak seharusnya terjadi mengingat NU akan berlaga dalam pemilu 1971. *Kedua* adalah berhasilnya Suharto meyakinkan para ulama bahwa dia dan Golkar akan memperjuangkan kepentingan umat Islam pada umumnya. Hasil dari manuver politik rezim ini menjadi jelas dengan besarnya dukungan masyarakat Banten terhadap Golkar pada pemilu 1971. Meskipun demikian, jika melihat situasi politik saat itu yang ditandai dengan kuatnya fanatisme golongan, para ulama NU tidak mungkin dengan mudah berbelok menjadi pendukung Golkar. Dapat dilihat dalam banyak kasus, para ulama lebih siap menerima intimidasi politik daripada keluar dari barisan NU sebagai partai politik. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa para pendiri Satkar Ulama ini lebih merupakan para jawara, atau walaupun ulama, mereka adalah ulama yang tertindas dan tidak bisa bergeming selain siap mendukung Golkar.

Selain para ulama, pemerintah atau Golkar sadar betul bahwa kelompok penting di Banten selain ulama adalah para jawara. Jawara yang awalnya merupakan para santri yang mendalami dan menguasai ilmu *kanuragan* mempunyai posisi penting dalam masyarakat Banten (Hudaeri, 2007). Mereka adalah para elite lokal yang bisa menyelamatkan masyarakat dari bahaya yang datang kepada mereka. Dengan ilmu *kanuragan*-nya para jawara adalah para jago yang bukan saja bisa melindungi masyarakat, tetapi juga pada sisi lain bisa membantu,

misalnya menyembuhkan mereka yang sakit. Fungsi jawara yang seperti ini menempatkannya dalam posisi penting dalam masyarakat Banten. Seperti terhadap para ulama, pemerintah lokal Banten dan Golkar berusaha mendekati para jawara ini dan sejak 1971 mereka telah membentuk wadah bernama Satuan Karya Jawara yang diketuai oleh Chasan Sochib (Irfani, 2011). Para Jawara ini direkrut ke dalam barisan Golkar yang ditugaskan untuk memenangkan mesin politik Suharto dalam pemilu 1971. Organisasi ini kemudian berkembang sampai sekarang dengan berganti nama menjadi Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa hadirnya Satkar Ulama ini bisa dilihat sebagai awal mulanya para jawara masuk ke dalam kekuasaan. Jawara sering disebut sebagai para murid ulama. Konon mereka adalah para santri (murid ulama) di pesantren yang kemudian memperdalam ilmu dan praktik *kanuragan*. Mereka kemudian menjadi jago dalam menghadapi musuh mereka, seperti aktivis PKI yang menyerang umat Islam. Di masa Orde Baru, para jawara telah digunakan betul oleh politisi Golkar untuk memobilisasi massa untuk memberikan dukungannya terhadap partai politik yang menjadi mesin politik Suharto. Dengan demikian, para jawara memulai masuk ke dalam kehidupan politik meskipun terbatas pada mendukung penguasa dan hanya satu dua orang saja yang kemudian direkrut menjadi politisi Golkar lokal. Meskipun demikian, langkah awal ini menjadi faktor penting yang turut membentuk politik Banten yang diwarnai oleh peran ulama dan jawara.

Keterlibatan jawara ini bisa dilihat dari aktifnya Chasan Sochib (Ayahanda dari Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten 2007–2015) sebagai pendukung Golkar sejati. Di samping hadirnya Satkar Ulama yang dibentuk melalui kesepakatan Suharto dan Kiai Mahmud, pada sisi lain kalangan jawara juga terjun dan tenggelam dalam kegiatan politik Golkar. Keikutsertaan Chasan Sochib secara jelas memberikan keuntungan pribadi, di mana dia konon mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Sebagai jawara dan terlibat dalam politik Golkar, Chasan Sochib bisa menjadi pengusaha sukses dan menjadi

Ketua Kadin Banten. Dengan demikian, Chasan Sochib juga menjadi elite politik penting Banten. Bahkan, belakangan dia juga menjadi Ketua Satkar Ulama, yang tentunya menguatkan posisinya sebagai politisi pengusaha. Di masa reformasi politik, Chasan Sochib menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk mengorbitkan anaknya untuk pertama kalinya menjadi Wakil Gubernur Banten. Bahkan, lebih jauh pengaruhnya ini bisa mendudukkan anak cucunya menjadi petinggi politik dengan menjadi wali kota atau bupati di wilayah Banten.

Meskipun sama-sama terkooptasi oleh Golkar melalui kekuasaan pemerintah, posisi para ulama dan Jawara ini agak berbeda dalam perkembangannya. Para ulama Banten yang memang pemimpin Islam tidak semuanya tunduk dan menjadi pendukung Golkar. Dengan kata lain, para ulama Banten tidak semuanya tergabung dalam Satkar Ulama. Seperti terlihat dari tetap kuatnya PPP di masa Orde Baru, para ulama sebagian besarnya tetap menjalankan politik Islam. Jawara, pada sisi lain, terkesan semuanya masuk dalam gerbong Golkar, mendukung politik pemerintah Orde Baru. Meskipun sama kuat dalam menganut Islam, para jawara berbeda dengan ulama dalam hal pengetahuan keislamannya, dan tentu juga dalam hal berpolitik Islam. Para jawara yang merupakan para jago yang dibekali ilmu *kanuragan*, bisa dikatakan sebagai muslim pada umumnya, yang berislamnya tanpa dibekali unsur keilmuwan memadai. Oleh karena itulah, jawara seperti terjerembab, masuk dengan penuh hati ketika diajak menjadi pendukung Golkar. Akan tetapi, dalam kenyataannya, masuk ke dalam barisan Golkar ini memberi manfaat besar dengan banyak terekrutnya para jawara ke dalam kekuasaan politik di wilayah Banten.

D. Dinamika Politik Era Reformasi

Berdasar pada pemahaman mereka tentang Islam, para ulama memang tidak membedakan masalah agama dengan politik. Artinya, dakwah untuk menerapkan Islam tidak hanya agar Islam dijalankan dalam bidang ibadah, tetapi juga harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti terlihat sejak lama, organisasi masyarakat Islam di Banten pada dasarnya adalah pendukung politik Islam, yakni politik

yang diperjuangkan dan dikejar oleh partai-partai Islam, seperti NU, Masyumi, dan PPP. Sejak pemilu 1971, para pendukung atau pengikut organisasi masyarakat sipil Islam memberikan dukungan kepada NU. Hal ini hampir sama dengan yang terjadi di tingkat nasional yang dalam pemilu ini Golkar mendapatkan suara yang jauh lebih tinggi dari partai Islam NU. Di samping pemilu, saat itu cukup panas berita terkait oknum Golkar, yang dibantu oleh pemerintah setempat termasuk oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), melakukan tekanan politik, bahkan intimidasi terhadap para ulama dan pengikut partai Islam. Saat itu, pemerintah juga telah memecah politik NU dengan mendirikan apa yang kemudian disebut sebagai Satkar Ulama. Organisasi ini dipimpin oleh seorang ulama, bernama Kiai Mahmud yang dipilih setelah pertemuannya dengan Presiden Suharto menjelang pemilu 1971.

Oleh sebab itu, partai NU di Banten juga tidak mendapatkan suara yang layak yang bisa disejajarkan dengan perolehannya di tingkat nasional. Dapat dilihat bahwa memang sudah sejak pemilu 1971, organisasi masyarakat sipil Islam tidak memberikan dukungan penuh terhadap partai Islam dan bahkan para pendukung Masyumi diduga sudah ikut dengan Golkar, seperti terjadi di tingkat nasional. Penurunan dukungan itu nyata bila melihat NU dan Masyumi masing-masing mendapatkan suara 18% dan 20% secara berurutan. Pada pemilu 1971 itu, suara yang didapatkan oleh Masyumi tersebut beralih ke Golkar karena dari 4 partai Islam yang ikut dalam pemilu 1971, perolehan mereka, termasuk NU, tidak melebihi 30%. Seperti disebutkan sebelumnya, rekayasa politik Orde Baru di Banten sudah berhasil sejak pemilu 1971 dengan dipecahnya ulama yang sebagiannya menjadi pendukung Golkar dan dibentuknya kelompok Jawara menjadi pendukung Golkar, yang bahkan secara keras ikut memobilisasi politik agar masyarakat Banten memberi dukungan pada Golkar.

Keberhasilan Golkar mendapatkan suara mayoritas pada pemilu 1971 adalah awal dari pengusuran politik Islam. Hanya saja, penggabungan empat partai Islam pada 1973 menjadi PPP di Banten justru memperkuat kembali partai Islam yang ada. Meskipun pada tingkat

nasional perolehan suara PPP meningkat pada pemilu 1977, hal itu tidak melebihi perolehan Golkar yang masih mayoritas. Meskipun demikian, di Banten fusi itu menjadi *'blessing in disguise'* karena suara yang didapatkan oleh partai Islam PPP di sini melebihi perolehan Golkar. Oleh karena itu, di saat berbagai daerah Indonesia sudah berhasil dipegang oleh Golkar, mengingat manuver dan tekanan politiknya cukup tinggi, Banten termasuk dalam 5 daerah yang masih kuat berpegang pada politik Islam dengan memberikan dukungan terhadap PPP sebagai partai Islam. Dapat dilihat di Kabupaten Serang pada pemilu 1977, PPP memperoleh suara 54,97%, yang lebih besar daripada perolehan Golkar, yaitu 42,52%. Seiring dengan mulai digoyangnya PPP melalui dimasukkannya John Naro sebagai pimpinan pusat partai Islam ini di tingkat pusat, dan kuatnya politik intimidasi terhadap para pendukung PPP oleh para aktivis Golkar, termasuk oleh para pejabat tentara di daerah masing-masing, perolehan suara PPP di Kabupaten Serang menurun pada pemilu 1982. Akan tetapi, perubahan ini juga jauh dari signifikan. Baru pada pemilu 1987 perolehan PPP anjlok secara signifikan dan Golkar meraih mayoritas suara menjadi 60% lebih. Penurunan perolehan ini bisa jadi merupakan imbas dari pengembosan yang dilakukan oleh NU sebagai pendukung utama PPP, yang saat itu keluar resmi dari partai Islam yang dibidannya. Lebih dari itu, para tokoh NU juga melakukan pengembosan terhadap PPP.

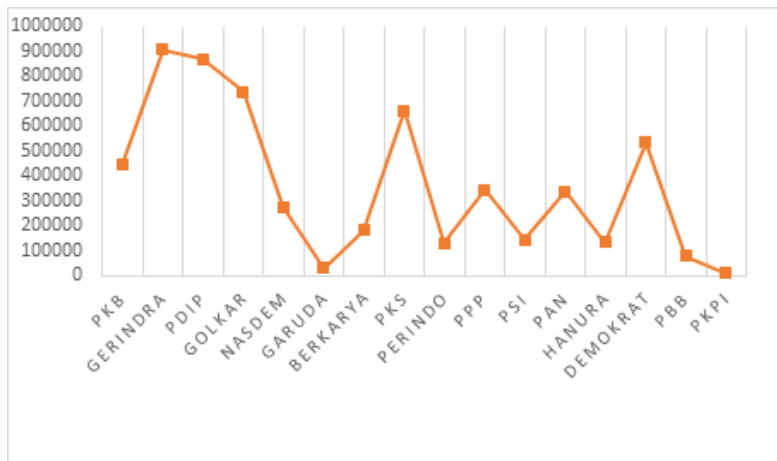
Tabel 3.3 Persentase Perolehan Suara Pada Pemilu 1977, 1982, dan 1987 di Kabupaten Serang

Organisasi Peserta Pemilu	1977	1982	1987
PPP	54,97	47,98	29,19
Golkar	42,52	48,57	60,35
PDI	2,52	3,45	10,45

Sumber: Hamid (2011)

Bisa dilihat dari Tabel 3.3 bahwa sampai pada pemilu 1977, PPP di Serang sebagai ibukota Kabupaten Banten saat itu memperoleh

suara lebih besar dari Golkar. Namun, seperti terjadi di daerah lain di wilayah Banten pada pemilu 1987, suara PPP terus menurun. Penurunan suara partai Islam ini memang terjadi secara nasional seiring dengan *political engineering* (rekayasa politik) yang dilakukan oleh Orde Baru, mulai dari penggabungan partai-partai Islam sampai dipaksakannya asas tunggal, yaitu Pancasila, sebagai dasar ideologis partai politik dan semua organisasi sosial keagamaan. Penurunan ini yang sekaligus menunjukkan menurunnya dukungan terhadap politik Islam pada umumnya terjadi, bahkan setelah reformasi politik dilakukan. Meskipun gairah berpolitik Islam seolah bangkit kembali setelah terjadinya reformasi politik yang mengiringi jatuhnya Orde Baru, semangat tersebut hanya bagian dari euforia demokrasi yang menggema dalam reformasi. Seperti dibuktikan oleh hasil perolehan partai-partai Islam pada beberapa pemilu, politik Islam ternyata tidak bisa bangkit lagi dan tidak mendapat dukungan masyarakat Banten. Pada pemilu 2019, hanya PKS yang masih mendapat dukungan agak kuat dari masyarakat Banten. Namun, jika digabungkan secara keseluruhan, suara yang diperoleh partai nonislam atau partai sekuler jauh lebih besar dan merupakan mayoritas (lihat Gambar 3.1).



Sumber: Rumah Pintar Pemilu (2019)

Gambar 3.1 Hasil Pemilu 2019 DPRD Provinsi Banten

Menurunnya kekuatan politik Islam memang bukan terjadi secara tiba-tiba. Hal ini adalah hasil dari rekayasa politik oleh Orde Baru yang fobia terhadap Islam. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Orde Baru berusaha melemahkan kekuatan politik Islam dengan merekrut para ulama ke dalam barisan pendukung Golkar, mesin politik Suharto. Para ulama diwadahi dalam organisasi Satuan Karya Ulama. Selain ulama, para jawara juga dimasukkan ke dalam barisan Golkar tersebut. Para jawara mungkin lebih mudah direkrut karena merupakan orang-orang yang berketerampilan kekuatan fisik alias jago. Oleh karena jago di kampungnya, dia juga menjadi orang penting atau menjadi tokoh yang tindakan politiknya, apalagi permintaan dukungannya, mendapat sambutan masyarakat. Selain itu, perkembangan masyarakat Banten menjadi modern juga telah menyebabkan sekularisasi politik. Artinya, masyarakat menganggap politik bukan lagi menjadi keharusan agama. Oleh karena itu, inilah yang terjadi, masyarakat Banten, meskipun makin kuat religiositasnya, telah melepaskan pilihan politik mereka dari bagian keharusan agama.

E. FPI dan Politik Islam

Meskipun semangat kebangkitan Islam mewarnai umat Islam, seperti terlihat dari bagaimana mereka melaksanakan Islam melalui maraknya pengajian atau meluasnya pemakaian simbol-simbol Islam, dalam berpolitik tidak semua kelompok Islam bersikap sama. Pada umumnya, umat Islam Indonesia memang menguat keberislamannya, tetapi untuk memperjuangkan politik Islam hanya sebagian kecil saja yang masih peduli. Di antara sedikit kelompok ini adalah FPI yang dinakhodai oleh Riziq Shihab. Semangat berpolitik Islam yang dimaksud adalah terkait dengan persistensi mereka dalam menerapkan ajaran atau nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini merupakan karakter yang mewarnai seluruh anggota FPI, termasuk tentu saja yang berada di wilayah Banten.

Di saat terjadi demonstrasi bela Islam, para kiai dan aktivis yang tergabung dalam FPI ikut ambil bagian dalam gerakan protes terhadap penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta saat itu.

Puluhan orang FPI, di samping umat Islam lain dari Banten Raya, pergi ke Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap gerakan protes tersebut. Lebih-lebih, gerakan yang kemudian terkenal dengan nama 'Bela Islam' itu dipimpin oleh Riziq Shihab, pemimpin tinggi FPI sehingga kedatangan para pendukung dan aktivis FPI memang seperti keharusan, setidaknya karena Riziq Shihab memimpin protes ini. Seperti bisa dilihat, sebagian orang kemudian menyematkan gelar kepada sang pemimpin dengan menyebutnya sebagai Imam Besar.

Hal yang sama terjadi ketika Riziq Shihab pulang dari Arab Saudi setelah dia mengasingkan diri karena didakwa dengan tuduhan melakukan percakapan mesum bersama seorang perempuan. Para anggota FPI Banten, termasuk juga sebagian umat Islam taat dari ormas lain, menanti-nanti kedatangan sang pemimpin, dan mereka juga ikut datang ke bandara Soekarno-Hatta menjemput Riziq Shihab pada 10 November 2020. Meskipun dibebani oleh masalah pandemi Covid-19 yang bisa membahayakan diri mereka dengan tertular dari orang lain yang ikut dalam penyambutan tersebut, para anggota FPI dan simpatisan Riziq Shihab tetap datang ke bandara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Apa yang bisa dicatat dari sini adalah bahwa *pertama* mungkin masyarakat Banten mendapatkan kesamaan ide atau harapan dalam hal kehidupan yang Islami yang hanya bisa didapatkan atau ditemukan dalam FPI. Ormas yang sering dianggap radikal ini begitu kuat dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Hal ini karena bukan saja karena mereka merupakan orang-orang Islam taat, tetapi juga mereka dengan kuat ingin menerapkan nilai dan ajaran Islam dalam praktik kehidupan mereka. *Kedua*, kepemimpinan dalam FPI bersifat karismatik sehingga dengan demikian para anggota dan simpatisan FPI mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh para tokoh yang memimpin organisasi ini. *Ketiga*, faktor keturunan nabi yang melekat terutama pada pimpinan puncaknya membuat para pengikut begitu hormat, mengikuti anjurannya, dan bahkan membela mati-matian jika sang pemimpin dalam bahaya. Unsur-unsur inilah yang membuat FPI kuat dan bahkan siap berhadapan dengan siapapun, selama tindakan

mereka tidak melanggar hukum yang ada. Itulah yang kemudian terjadi, misalnya, setelah Riziq Shihab berada di Jakarta, di Kota Serang beredar selebaran apel akbar dalam menyambut kedatangan Riziq Shihab di Serang. Hal ini adalah ekspresi kegembiraan para aktivis FPI Serang, yang mengharapkan Riziq Shihab datang ke Serang. Rencana apel memang dibantah oleh pihak kepolisian karena saat itu memang belum ada permintaan izin atau pemberitahuannya.

Perlu dicatat bahwa terkait dengan hingar bingarnya rencana kedatangan Riziq Shihab ke Serang, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Warga Banten (AWAB) berdemonstrasi menolak kehadiran Riziq Shihab di Serang. Lebih jauh, bahkan AWAB mengatakan, seperti tertulis dalam spanduknya bahwa Riziq Shihab bukanlah keturunan nabi. Sikap menolak Riziq Shihab memang bukan dilakukan oleh kalangan Islam taat yang tergabung dalam organisasi besar, seperti NU dan Muhammadiyah. Hal ini adalah lagu lama yang juga didengungkan oleh kalangan tertentu, seperti di Jakarta. Gaung dari spanduk ini cukup besar karena mengatasnamakan masyarakat Banten. Oleh karena itu, para jawara turut mendukungnya. Meskipun demikian, kemudian muncul sanggahan dari sekelompok ulama dan santri dari suatu kecamatan di wilayah Banten yang menyatakan bahwa mereka siap menerima Riziq Shihab untuk hadir di Banten, dan mereka sekaligus mengakui bahwa Riziq Shihab adalah keturunan Nabi Muhammad. Adanya pernyataan membuat para jawara yang tadi hadir berkumpul di bawah spanduk penolakan tersebut terpaksa harus mendatangi ketua FPI Banten, untuk meminta maaf. Kejadian ini memperlihatkan bahwa di samping adanya dukungan terhadap FPI atau ketua umumnya, terdapat juga kalangan yang menolak kedatangannya. Apa yang agak menarik adalah dukungan terhadap penolakan itu dilakukan oleh para ulama dan santri sehingga para jawara malah menjadi turut mendukung mereka yang menerima Riziq Shihab di Serang.

Kejadian ini adalah fakta yang memperlihatkan bagaimana organisasi masyarakat pada umumnya berkaitan dengan dukungan politik mereka. Dalam hal ini, kalangan organisasi masyarakat sipil Islam

tetap memberikan dukungannya terhadap perjuangan untuk Islam sementara yang lainnya, yakni organisasi masyarakat sipil umum, lebih berjuang dengan orientasi sekuler. Namun, lepas dari kuatnya mereka mendukung kedatangan Riziq Shihab, masalah keterlibatan riil dalam politik hanya bisa diduga-duga. Apa yang pasti adalah bahwa sama dengan organisasi NU dan Muhammadiyah, kalangan FPI juga tidak mempunyai target mendirikan Negara Islam. Oleh karena itu, berbeda dengan HTI dan MMI, kalangan FPI sudah menganggap Indonesia ini Negara Islam, bahkan landasan kebangsaan organisasi ini adalah Pancasila. Dengan demikian, bisa diduga bahwa tidak semua anggota FPI memberikan dukungannya kepada PKS sebagai partai Islam, atau partai lainnya yang didirikan oleh kalangan Islam taat.

Di luar masalah-masalah yang biasa digeluti FPI, yakni berdakwah dengan gaya keras atau memberantas kemaksiatan, mereka juga dengan nyata melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu masyarakat Banten. Mereka, misalnya, membantu mengevakuasi korban banjir yang terjadi di wilayah Banten. Di Cikande, mereka menyemprotkan disinfektan saat masa pandemi Covid-19. Ketika Banten dilanda gempa, para aktivis FPI ini turun ke jalan menggelar aksi pengumpulan dana di Cisoka, Kronjo, Curug, Pagedangan, Balaraja, Cikupa, dan Panongan (Redaksi, 2019).

Meskipun sudah berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, para aktivis FPI tetap melakukan bakti sosial sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah mereka. Pada Iduladha tahun 2021, Badan Kemanusiaan FPI melakukan pembagian daging kurban (Faktakini.info, 2019). Kenyataan seperti ini memang kurang terungkap dan tidak banyak diketahui oleh anggota masyarakat. Apa yang lebih terekspos biasanya menyangkut kekerasan yang dilakukan mereka, misalnya ketika memberantas masalah-masalah terkait kemaksiatan.

F. Penutup

Menguatnya semangat berislam atau melaksanakan Islam di kalangan masyarakat Banten memang cukup terasa, seperti juga terjadi pada masyarakat Islam di Indonesia bagian lain. Bangkitnya semangat ini

terasa setelah cukup lama Islam yang cukup mengakar di Banten seolah diam tak bergerak, lebih-lebih setelah digusurnya politik Islam oleh Orde Baru. Meskipun demikian, penggusuran atau kekalahan ini rupanya hanya terjadi di bidang politik karena di bidang lain, bahkan pada masa Orde Baru pun, tidak terhalang. Oleh sebab itu, setelah berjalan cukup lama dan terjadi reformasi politik, semangat berislam atau juga membangun politik Islam seolah menguat kembali. Beberapa partai Islam didirikan oleh masyarakat Banten. Hanya saja, dalam perkembangannya partai politik itu seperti kurang didukung oleh masyarakat Islam Banten. Hal ini memang gejala umum di Indonesia yang juga terasa di Banten sehingga dalam pemilu apa yang unggul adalah partai-partai sekuler.

Gejala ini memperlihatkan bahwa kebangkitan semangat berislam di Banten tidak searah dengan atau tidak berkorelasi dengan menguatnya politik Islam. Masyarakat Banten tidak lagi menyambut politik Islam dengan memberikan dukungan terhadap partai-partai Islam. Hal ini artinya politik Islam bukanlah diarahkan untuk memperkuat ideologi Islam atau Islam sebagai ideologi yang digunakan oleh negara. Politik Islam lebih dimaknai sebagai perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam atau mengembangkan Islam sendiri sebagai agama yang penuh dengan ajaran serta norma bagi kehidupan pemeluknya. Oleh karena itu, organisasi-organisasi masyarakat sipil Islam yang ada telah berkembang dengan membawa misi mengembangkan Islam dan berjuang untuk kepentingan umat Islam. Dengan demikian, apa yang disebut perjuangan politik Islam memang tidak tunggal menjadi agenda atau tujuan perjuangan organisasi masyarakat sipil Islam ini.

Organisasi masyarakat sipil Islam di Banten cukup berkembang setelah hambatan yang dibentangkan oleh Orde Baru dibuka melalui reformasi politik. Berbagai ormas ini, dan bahkan yang berkarakter trans-nasional, juga hadir di Banten, meskipun perlu ditegaskan bawa HTI telah dibubarkan dan kegiatannya di Banten juga tidak terlihat. Kehadiran beragamnya organisasi masyarakat sipil ini selain memperlihatkan Banten terbuka, di luar kenyataan bahwa mayoritas

penduduknya hampir 95% beragama Islam, juga ternyata orientasi politik masyarakatnya tidak monolitik. Kuatnya Islam yang tertanam dalam diri masyarakatnya tidak dengan serta merta menahan mereka untuk tetap berpolitik Islam. Apa yang pasti adalah bahwa demokratisasi yang mengiringi reformasi politik telah mengembangkan dan memperkuat kehadiran organisasi masyarakat sipil Islam, dan menguatnya masyarakat sipil ini sebaliknya juga turut memperkuat demokrasi karena masyarakat sipil yang kuat dan berdaya telah ikut menumbuhkan jiwa demokratis pada para pengikutnya.

Daftar Referensi

- Cakrawalanews. (2018, 11 Februari). *MMI ajak umat tidak golput dan tidak terpancing isu sara*. <https://www.cakrawalanews.co.id/artikel/1834/MMI-Ajak-Umat-Tidak-Golput-dan-Tidak-Terpancing-Isu-SARA/>
- Detiknews. (2009, 27 Agustus). *Abu Jibril dituduh sebar ajaran sesat, MMI Gelar tabligh akbar*. <https://news.detik.com/berita/d-1190965/abu-jibril-dituduh-sebar-ajaran-sesat-mmi-gelar-tabligh-akbar->
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad politik ulama: Sejarah NU 1952–1967*. LKIS.
- Faktakini.info. (2021, 23 Juli). BK FPI Kota Serang Banten tebar qurban untuk warga terdampak PPKM di Kasemen. *Faktakini*. <https://www.faktakini.info/2021/07/bk-fpi-kota-serang-banten-tebar-qurban.html>
- Hamid, A. (2011). Pergeseran Peran Kyai dalam Politik di Banten Era Orde Baru dan Reformasi. *Al-Qalam*, 28(2), 339–364. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i2.895>
- Hamid, A. (2013). Memetakan aktor politik lokal banten pasca orde baru: Studi kasus kiai dan jawara di Banten. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 32–45. <https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.32-45>
- Hefner, R.W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2019). Whatever happened to civil Islam? Islam and democratisation in Indonesia, 20 years on. *Asian Studies Review*, 43(3), 375–396. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Hudaeri. M. (2007). *Tasbih dan golok: Kedudukan, peran, dan jaringan kiyai dan jawara di Banten*. Humas dan Protokol, Setda Provinsi Banten.
- Irfani, F. (2011). *Jawara Banten: Sebuah kajian sosial, politik dan budaya*. YPM Press.

- Kementerian Agama. (t.t.). *EMIS Dashboard*. Diakses pada Januari, 2023, dari <https://emis.kemenag.go.id/>
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan petani Banten 1888*. Pustaka Jaya.
- Kabar Banten. (2017, 27 Desember). Sering meresahkan, warga razia waria. *KabarBanten.com*. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59607975/sering-meresahkan-warga-razia-waria>
- Liddle, R. & Muzani, S. (2013). Indonesian democracy: From transition to consolidation. Dalam M. Künkler, & A. Stepan, (Ed), *Democracy and Islam in Indonesia* (24–50). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/kunk16190-006>
- Liputan6. (2014, 4 Oktober). FPI Banten razia tempat hiburan malam jelang Idul Adha. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/2114183/fpi-banten-razia-tempat-hiburan-malam-jelang-idul-adha>
- Nurita, D. (2019, 29 November). AD/ART disorot, FPI: Kami menegakkan khilafah tanpa hapus NKRI. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1278226/ad-art-disorot-fpi-kami-menegakkan-khilafah-tanpa-hapus-nkri>
- Redaksi. (2019, 3 Agustus). *Relawan FPI Kabupaten Tangerang galang dana gempa Banten*. <https://kabar6.com/relawan-fpi-kabupaten-tangerang-galang-dana-gempa-banten/>
- Rumah Pintar Pemilu. (2019, 13 Mei). *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Banten pemilu tahun 2019*. Diakses dari <https://rpp-kpubanten.id/suara/dprd>
- Turmudi, E. (2016). Islamic politics in contemporary Indonesia. *International Journal of Political Studies*, 2(3), 1–9.
- Turmudi, E. (2018). PURITANISM VIS-A-VIS TRADITIONALISM: ISLAM IN MODERN INDONESIA. *Harmoni*, 11(2), 25–42.